

---

## TINDAKAN SOSIAL EKONOMI DALAM PERSPEKTIF NEW INTERNATIONAL SOCIOLOGY

### *Abstract*

*This writing tries to explore the social action in the perspective of New International Sociology. In the literature that social action in the relation of economy has three kinds of Phenomena i.e economic phenomena, economically relevant phenomena, and economically conditioned phenomena. The perspective of economically conditioned phenomena has relation with social capital (there are three components)-network structure, trust and reciprocity, and resources-that are associated with but vary in degree and salience for all forms of social capital.*

**Key Words:** *Social Capital, Social Collective dan Social Action*

---

**Yudo A. Mahendro**

Email: mahendro@yahoo.com

---

Dosen Sosiologi Universitas Negeri  
Jakarta

### **A. Pendahuluan**

Pandangan bahwa negara sebagai satu-satunya elemen yang berhak mengatur aktivitas-aktivitas sosial warga negaranya (absolut) terus mengalami pergeseran. Hal ini merupakan refleksi atas eksistensi negara yang dipandang hanya mewakili kepentingan elit semata, atau yang dalam bahasa Gran disebut negara birokratik (dalam Martinussen, 1999; 333-334). Sehingga dalam iklim demokrasi (sebagaimana yang terjadi di Indonesia), negara kini memiliki peran yang lebih terbatas yaitu sebagai *regulatory institution* (Widjajanto, 2007; 22). Dalam artian, negara hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang tentunya juga sesuai dengan keinginan warga negaranya. Dengan demikian, dalam upayanya untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat harus berupaya secara mandiri. Lebih lanjut, Gran berpendapat bahwa masyarakat harus diberikan proporsi yang lebih untuk mengatur dirinya sendiri atau diberikan andil untuk berpartisipasi aktif dalam kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh negara (dalam Marinussen, 1999; 335-338).

Relasi antara negara dan masyarakat dalam perkembangan mutakhir selalu menjadi perbincangan akademis yang hangat. Wollstein dan Koch (disunting oleh Jubort dan Koch, 2008) memberikan uraian rinci mengenai kaburnya istilah masyarakat sipil (*civil society*) terkait dimensi peran dan aktor. Dalam dimensi aktor disparitas muncul atas pertanyaan siapa yang memegang kendali, apakah masyarakat sipil menginisiasi secara mandiri atau malah negara? (hal 196). Dalam penjelasannya Wollstein dan Koch menguraikan fakta empiris yang bahwa dua kutub tersebut memang eksis dengan konteks sosial di masing-masing negara. Dengan demikian, perlu memandang negara sebagai 'inclusive sphere' yang karakternya ditentukan oleh norma masyarakat yang ada serta dipaksakan oleh pemerintah yang berwenang (Post dan Rosenblum, 2002).

Block and Evans (disunting oleh Smelser dan Swedberg, 2005) memperkenalkan pemahaman baru untuk membaca perkembangan suatu negara dengan konfigurasi kelekatan (*embeddedness*) antar tiga institusi makro; negara, pasar, dan masyarakat. Artinya perkembangan suatu negara tidak dapat dilakukan oleh negara atau masyarakat semata, namun membutuhkan kelekatan antar elemen-elemen tersebut. Pandangan ini menjadi alternatif pemikiran untuk mengembangkan masyarakat selain dengan pendekatan Marxian (lihat Scott, 1985; Rivera, 1994; Baker, 2002; Boudreau; 2001) atau yang disebut oleh Alexander (2006) dengan perspektif *civil society II*.

Lebih lanjut, Yosihara and Dwiyanto (2003) juga mencoba

memberikan argumen pentingnya melihat masyarakat atau *grass roots*, tidak hanya dalam pandangan yang terpisah dengan negara. Chonakai di Jepang dan RT/RW di Indonesia juga dapat dilihat sebagai elemen yang juga menyuarakan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam studi yang lebih awal di Indonesia, Tjondronegoro (1984) berkontribusi untuk membangun konsepsi setiap organisasi masyarakat yang *government-oriented* dan *community-oriented* dalam pandangan yang lebih netral. Hal ini dipahami karena, setiap organisasi masyarakat dengan berbagai konteks sosialnya sama-sama memiliki peran untuk menyuarakan dan menjalankan kepentingan-kepentingan internal mereka.

Dalam studi lain (Winarno, 2008) juga melihat kelekatan yang kuat antara organisasi desa dengan kebijakan pemerintahan ditingkat pusat. Namun, dalam studi ini organisasi-organisasi di tingkat desa hanya dilihat sebagai representasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah semata. Sebagaimana Winarno (2008), studi Long (2005) di pedesaan Cina dan Radhakrisna (1997) di pedesaan India juga melihat perkembangan masyarakat desa sebagai akibat dari perubahan struktur ekonomi dan politik yang terjadi. Feonmena ini dipahami karena konteks masyarakat desa di Asia tidak banyak pilihan untuk merespon perubahan-perubahan struktural yang ada.

Di sisi lain, studi Suryana (2007) memperlihatkan bagaimana masyarakat secara mandiri mengelola ruang sosial suburban. Dijelaskan dalam studi tersebut, bagaimana setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatur setiap

keperluannya secara mandiri tanpa kehadiran negara yang signifikan. Kemudian Soemantri (disunting oleh Dwiyanto dan Yosihara, 2003) memperlihatkan kemampuan organisasi Muhammadiyah di Jakarta mengembangkan kebudayaan, ekonomi dan politik bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, Achwan (2012) memberikan uraian mengenai perkembangan lembaga keuangan mikro Pancur Kasih di Kalimantan Barat yang cukup pesat dengan ikatan etnisitas kedayakan (lihat juga Nugroho, 2003; Stuart dan Kanneganti, 2003). Perspektif dalam studi-studi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Suryana (2007) memang berpegang pada pendekatan keagenan, dalam artian mencoba menjelaskan masyarakat (dan perkumpulan sosial) sebagai aktor yang kreatif dan tidak selamanya ter subordinasi oleh institusi-institusi makro seperti; negara dan kapital.

Dengan demikian, studi mengenai organisasi-organisasi masyarakat lokal khususnya di pedesaan memang perlu ditinjau dari sisi perubahan struktur ekonomi-politik sekaligus kemampuan organisasi untuk menyuarakan dan menjalankan kepentingan-kepentingan internal mereka. Perpaduan dua analisa itu terdapat pada studi Yosihara (2003) yang menjelaskan bagaimana hubungan chonakai (organisasi ketetanggan di Jepang) bersinergi dengan pemerintah. Kemudian, Diamond (2007) menunjukkan bahwa semenjak partai Buruh berkuasa di Inggris, komunitas ketetanggan (*neighborhood association*) secara efektif memainkan peran penting dalam membuat regulasi dan pelaksanaannya sebagai akibat kelekatanannya dengan pemerintahan lokal.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa pemahaman tentang perkumpulan-perkumpulan sosial dapat ditinjau dari berbagai dimensi. Perkumpulan-perkumpulan sosial sebagai ajang anggota masyarakat beraktualisasi tentunya memiliki dinamika internal dan eksternal (struktur), sehingga munculah disparitas analisa akademik untuk membahasnya. Pemetaan mengenai studi masyarakat sipil dilakukan oleh Wollstein dan Koch (disunting oleh Jubort dan Koch, 2008) dengan membagi dua dimensi; aktor dan peranannya. Berikut ini merupakan matrik mengenai ragam jenis masyarakat sipil berdasarkan pembagian dimensi tersebut:

**Matrik 1**  
**Dimensi Aktor dan Peran dari Masyarakat Sipil**

Aktor	Fungsi Masyarakat Sipil	
		Membela hak politik dan memberdayakan masyarakat
Masyarakat yg aktif	<b>Sumber dan promotor demokrasi (Kategori I)</b> - mendorong demokratisasi - representasi dari keberagaman kepentingan masyarakat	<b>Penjamin kepentingan masyarakat (Kategori II)</b> - meminta dan menyediakan pelayanan publik - akar rumput sebagai organisasi yang mandiri

Negara yang aktif	<b>Warga yang bertanggungjawab (Kategori III)</b> - kewargaan sosial - masyarakat sipil sebagai sekutu politik	<b>Partner dalam pemerintahan yang baik (Kategori IV)</b> - memberi masukan untuk pelayanan publik - masyarakat mendukung g kewargaan
-------------------	--	--

Sumber: Wollstein dan Koch (*disunting oleh Jubort dan Koch, 2008; 200*)

Dari matrik di atas, perkumpulan sosial yang juga dimaknai sebagai, *grass root* dan (Dwiyanto dan Yosihara, 2003; Diamond, 2007), *local institution* (Nugroho, 2003), *social organization* (Tjondronegoro, 1984), dan organisasi pedesaan (Winarno, 2008) berada pada kategori II dan IV. Hanya studi Diamond (2007) yang menjelaskan tentang *neighborhood association* di London yang masuk dalam kategori III. Hal ini dipahami karena latar belakang pendidikan masyarakat yang tinggi serta stuktur politik demokrasi yang sudah mapan. Dengan demikian secara umum perkumpulan sosial khususnya di pedesaan memiliki domain sebagai penjamin kepentingan masyarakat serta partner pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Perkumpulan sosial dalam Kategori IV pada konteks Indonesia sesungguhnya baru muncul semenjak era reformasi (Achwan, 2012; Nugroho, 2003; Dwiyanto dan Yosihara; 2003). Hal ini dipahami karena pada masa sebelum reformasi,

perkumpulan-perkumpulan sosial perannya sangat terbatas dan diawasi dengan ketat. Sehingga perubahan kondisi politik yang lebih terbuka dan demokratis menjadi iklim yang subur untuk perkumpulan sosial memperluas peranannya (lihat Radyati, 2008; 256). Sedangkan studi pada zaman Orde Baru (Tjondronegoro, 1984; Winarno; 2008) memperlihatkan peranan perkumpulan sosial yang hanya terbatas pada kategori II itu pun masih sangat terbatas.

Kondisi perkumpulan sosial di Indonesia melihat studi-studi yang ada cukup signifikan berubah. Perubahan itu, jika melihat kembali pada matrik 1, dikatahui karena adanya pergeseran peran aktor (*agent*) dari masyarakat yang aktif kepada negara yang aktif. Namun dalam studi-studi yang ada, kondisinya malah terbalik (lihat Achwan, 2012; Nugroho, 2003). Studi-studi tersebut menggambarkan dalam peran negara yang cenderung pasif, masyarakat malah membuat inovasi-inovasi tersendiri dalam aktifitas pada perkumpulan-perkumpulan sosial.

Dalam studi Antlov (2003) tentang perkumpulan sosial dalam konteks desentralisasi di Indonesia, memotret perubahan tersebut secara lebih konprehensif. Bermunculannya kekuatan masyarakat sipil dalam skala yang lebih kecil di daerah-daerah menyisakan dua masalah utama dalam upaya membentuk warga yang lebih baik. Pertama ialah masalah kekakuan administrasi publik, yang merujuk pada masih melekatnya pendekatan *top down* dalam setiap pembahasan masalah-masalah organisasi. Kedua ialah, ketidakmampuan organisasi masyarakat sipil dalam

mempromosikan alternatif-alternatif politis handal. Artinya, ada masalah dalam internal organisasi masyarakat sipil sendiri yang sangat akut, yaitu kejumudan inovasi serta ketidakterbukaan akses bagi semua anggota.

Oleh karenanya, membicarakan hubungan antara negara dan masyarakat menjadi penting agar tidak mengesankan aktor berdiri sendiri-sendiri atau terpisah sama sekali. Mengikuti alur pikir Block dan Evans (2005) mengenai kelekatan antara masyarakat dan negara menjadi signifikan untuk membahas perkumpulan sosial di Indonesia untuk mengisi gap aktor yang digambarkan dalam matrik 1. Penelusuran tentang hubungan antara masyarakat dan negara telah dibahas oleh Szreter (2002) sebagai modal sosial (*social capital*) yang dioperasionalkan dengan konsep jaringan (*network*).

Selain itu, analisa *New Institutionalism in Economic Sociology* (Nee, 1998, 2005, 2010; Zenger dan Larzzini, 2001) juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa hubungan antara perkumpulan-perkumpulan sosial dengan negara. Karena, jejaring (*network*) tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang salah satu aktor semata (dalam hal ini perkumpulan sosial). NIES, akan membantu menjelaskan hubungan institusional antara perkumpulan sosial dan negara dari sudut pandang yang lebih konfrehensif.

Berpijak pada argumen di atas, maka terdapat dua pertanyaan utama: (1) Bagaimanakah dinamika *bounding* dan *bridging* dalam perkumpulan sosial pedesaan? Apakah terkait kesaamaan etnik, kesamaan kampung halaman, latar belakang ekonomi atau

yang lain? Bagaimana dinamika perkembangan ciri-ciri sosial ini? Apakah bisa berubah atau tidak? Bahkan dalam konteks munculnya pemerintah lokal baru, (2) Bagaimana peran negara di dalam *bonding*, *bridging* dan *linking* perkumpulan sosial pedesaan? Mekanisme sosial apa yang mendorong atau menghambat pembentukan hubungan antara perkumpulan sosial dengan negara?

## B. Signifikansi Perkumpulan Sosial

Banyak penelitian yang menjelaskan tentang fenomena perkumpulan sosial. Namun, untuk memahami lebih dalam konteks perkumpulan sosial pedesaan di Indonesia, setidaknya beberapa studi yang dapat menjadi rujukan yaitu; studi Sediono M.P. Tjondronegoro (1984) dengan judul *Social Organization and Planed Development in Rural Java* (1984), studi Budi Winarno (2008) dengan judul *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia* (2008), kemudian studi Ben White (disunting oleh Tania M. Li, 2005) dengan judul *Nucleus and Plasma: Contract Farming and The Exercise of Power in Upland West Java*. Selain itu studi James S. Scott (1985) dengan judul *Weapon of The Weak: Everyday Form of Peasant Resistance*, walaupun dengan konteks pedesaan di Malaysia, dalam studi ini sangat relevan karena adanya kemiripan dari segi ekonomi dan budaya.

Tjondronegoro (1984) melakukan studi mendalam pada dua Kecamatan yaitu Cibadak di Jawa Barat dan Kendal di Jawa Tengah yang terdiri dari tujuh desa. Penelitian tersebut ingin mengetahui fungsi organisasi-organisasi pedesaan

dalam kaitannya untuk mendukung pembangunan yang partisipatif. Salah satu kekuatan studi ini ialah menggunakan analisa "social mapping" untuk mengetahui kondisi desa dengan baik. *Social mapping* itu mencakup populasi, jenis pekerjaan, lokasi berkumpul, potensi akses desa terhadap fasilitas pelayanan publik, tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta tentunya organisasi sosial pedesaan yang ada. Dengan demikian, akan diketahui secara jelas latar belakang terbentuknya serta fungsi dari perkumpulan-perkumpulan sosial pedesaan di kedua kecamatan tersebut.

Temuan penting dalam studi ini ialah bahwa organisasi yang berada pada level sub-desa seperti dusun atau kampung (*hamlet*) lebih menunjukkan solidaritas yang cukup kuat dibandingkan dengan organisasi pada level desa. Hal ini dilihat dari aspek loyalitas untuk kesukarelaan pada organisasi serta pemimpin yang mereka pilih sendiri. Fenomena ini menurut Tjondronegoro fenomena ini terjadi karena pada level dusun atau kampung organisasi sosial dibentuk atas dasar untuk pemenuhan kebutuhan mereka secara langsung (hal 260).

Pada sisi lain, organisasi-organisasi pada level desa seperti badan musyawarah desa (BPD) telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dipahami karena adanya tekanan dari pemerintah yang lebih tinggi tentang syarat-syarat keanggotaan dari organisasi tersebut. Dengan demikian, pemimpin-pemimpin informal di tingkat dusun yang lebih dipercaya oleh masyarakat banyak yang tidak diakomodir untuk masuk kedalam BPD karena alasan perbedaan politik. Dampaknya ialah,

keterputusan komunikasi antara masyarakat desa dengan pemimpin-pemimpin formal tersebut. Kondisi demikian inilah yang menyebabkan organisasi-organisasi ditingkat desa yang biasanya sudah berbentuk organisasi formal telah kehilangan legitimasi dari masyarakat pedesaan.

Walaupun studi ini dibuat sudah cukup lama serta dengan konteks sosial yang sangat berbeda (era orde baru), namun studi ini memberikan informasi penting tentang kondisi faktual perkumpulan-perkumpulan sosial pedesaan. Sehingga akan terlihat tantangan besar dari organisasi di tingkat desa yang formal dalam menghadapi perubahan kekuasaan dan iklim politik di Indonesia kini.

Berikutnya ialah studi Winarno (2008) yang menganalisa kebijakan pemerintah orde baru yang dibuat pada tahun 1970-an tentang (badan usaha unit desa) BUUD/ (koperasi unit desa) KUD di Indonesia. Studi ini menggunakan data skunder untuk menganalisa organisasi desa tersebut dalam kaitannya dengan produktifitas pertanian. Kekuatan studi ini ialah adanya komparasi antara organisasi pedesaan di Indonesia dengan beberapa negara seperti Taiwan, Thailand, dan Filipina. Dari komparasi tersebut terlihat bias dari fungsi organisasi pedesaan yang bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian namun juga dalam upaya stabilitas politik yang memang menjadi jargon orde baru.

BUUD/KUD menurut Winarno dalam prakteknya di pedesaan tidak mencerminkan sebagai organisasi yang demokratis dan partisipatif. Organisasi tersebut

hanya menjadi instrument kepentingan dari petani-petani besar yang memiliki akses ke pemerintahan yang lebih tinggi. Sehingga program-program seperti kredit murah, penyediaan benih unggul, pupuk dan pestisida hanya didominasi oleh kalangan elit tersebut. Menurut studi ini keberadaan BUUD/KUD malah menyumbangkan masalah yang besar bagi petani-petani kecil karena harus masuk dalam sistem tersebut yang malah membebankan biaya bertani dengan mekanisme pertanian yang ditawarkan oleh pemerintah.

Analisa studi ini cukup tajam, namun kekurangannya ialah tidak adanya data primer yang menggambarkan relasi kuasa ditingkat organisasi desa. Sehingga tidak dapat ditemukan deksripsi yang lebih empirik dalam menggambarkan situasi dalam BUUD/KUD yang ada. Walaupun begitu, studi ini memberikan pelajaran penting mengenai dampak kebijakan pemerintah lewat organisasi masyarakat memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat pedesaan.

Seperti melengkapi studi Winarno (2008), studi White (2005) memberikan informasi yang lebih detail tentang KUD. Studi ini menjelaskan bagaimana pemerintahan orde baru yang menerapkan desa sebagai lumbung sumber daya ekonomi sekaligus menerapkan mekanisme stabilitas politik. Dalam studi yang dilakukan di desa Cisokan Jawa Barat ini, secara detail memperlihatkan pembentukan kontrak unit kerja antara petani dengan negara untuk meningkatkan komoditas kelapa. Kondisi demikian, digambarkan sebagai represi negara terhadap masyarakat, apalagi penggunaan lahan pertanian bersama

itu hanya sepihak ditentukan oleh negara. Dengan demikian, para petani kecil yang biasanya dapat mencari penghidupan dari kehidupan yang bersandar dari sumber perkebunan, akibat pembuatan lahan untuk kelapa kehilangan pendapatan-pendapatan sampingan mereka.

Lebih lanjut, studi ini menjelaskan peran KUD yang menjadi pemisah antara petani dengan pasar. Hal ini terlihat dengan penetapan harga yang tidak disesuaikan dengan harga pasar yang tentunya sangat merugikan para petani kecil pedesaan. Selain itu, KUD juga cenderung menjadi alat kuasa atas monopoli perdagangan yang dilakukan oleh negara. Tak jarang, KUD malah cenderung mengeksklusi petani kecil yang belum bergabung atau tidak berhubungan secara aktif.

Studi ini sangat penting untuk melihat analisa relasi kuasa dalam perkumpulan sosial pedesaan. Karena diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam KUD sebagaimana yang diperlihatkan oleh Winarno (2008) dikuasi oleh petani besar. Dengan demikian, perkumpulan sosial pedesaan juga harus dilihat dengan analisa kuasa para aktor-aktornya. Apalagi dalam konteks reformasi tentunya relasi kuasa ini akan semakin kompleks.

Selaras dengan fenomena tersebut, dalam studi Scott (1985) juga terlihat bagaimana institusi lokal pedesaan menjadi bagian tak terpisahkan dari relasi kuasa dengan negara. Sedaka sebagai lokasi penelitian mewakili karakteristik pedesaan Malaysia pada waktu itu. Seperti Tjondronegoro (1984), Scott membuat analisa '*social mapping*' yang cukup konfrehensif namun fokus pada kehidupan pertanian. Ia secara rinci menjelaskan komposisi petani

ditinjau dari sisi pendapatan yang pada akhirnya dapat dipisahkan antara petani kaya dan petani miskin. Kemudian ia menjelaskan tentang mekanisme bertani bagi kedua karakteristik tersebut. Dengan situasi kultural yang masih berpangku pada feodalisme dan patron-klien, dijelaskan bagaimana petani miskin memiliki ketergantungan dengan petani kaya dalam hal menyewa lahan pertanian.

Dalam studi ini dijelaskan peranan Mada sebagai sebuah perkumpulan kaum tani yang menjadi corong dari penguasa. Mada sebagai organisasi petani yang memiliki mirip KUD di Indonesia, memiliki fungsi untuk menyalurkan kredit untuk pembelian, bibit, mesin, dan juga pupuk. Scott menggambarkan Mada yang didominasi oleh para petani kaya cenderung diarahkan untuk mendukung partai yang sedang berkuasa di Malaysia pada waktu itu; UMNO. Bahkan, para petani miskin yang mendukung partai PAS (oposisi) tidak dimasukkan ke dalam organisasi tersebut sehingga tidak dapat menikmati berbagai program yang disediakan oleh Mada.

Dijelaskan juga, dampak dari pertarungan politik antara UMNO dan PAS tidak hanya terjadi pada Mada. Dengan relasi kekeluargaan yang kuat, jaringan keluarga yang kaya di Sedaka menempati posisi-posisi strategis pada banyak organisasi pedesaan seperti pengurus masjid, komite sekolah, koperasi, dan lain-lain. Lebih jauh, bahkan perkumpulan yang lebih kultural seperti pengajian, arisan, kenduri di Sedaka terbentuk berdasarkan relasi partai.

Studi ini kemudian menunjukkan bagaimana kelompok petani miskin yang berafiliasi pada partai PAS, mengalami eksklusi sosial yang cukup massif dari kelompok yang berkuasa. Hal ini membuat para petani miskin melakukan jalur perlawanan yang laten, karena dapat dipahami bahwa jaringan birokrasi negara sangat sulit untuk dibendung. Para petani miskin walaupun terkesan tak mampu melawan namun mereka terus mereproduksi kesadaran ideologis untuk melakukan perlawanan kepada kaum penguasa.

Konteks pedesaan yang melingkupi dinamika perkumpulan sosial sudah tergambar baik dalam studi-studi di atas. Namun, dengan perubahan politik nasional tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk perkumpulan-perkumpulan sosialnya. Walaupun tidak memotret kondisi pedesaan, ada beberapa studi yang dapat memperlihatkan geliat perkumpulan sosial era reformasi di Indonesia. Studi tersebut diantaranya ialah (Nugroho, 2003 disunting oleh Dwiyanto dan Yosihara) dengan judul *The Existence of Local Institution within A Changing Society: From the View Point of Grass root Community in Jakarta*, serta studi Achwan (2012) dengan judul *The Fountain of Love Credit Union: A Vibrant Microfinance institution in a Hostile Inter-Ethnic Society*. Kemudian studi Hadiz (2010) dengan judul *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A South-East Asia Perspective* menjadi studi yang sangat membantu untuk melihat dinamika perkumpulan sosial di daerah pasca reformasi di Indonesia.

Nugroho (2003) menjelaskan bagaimana perkumpulan sosial di



Jakarta pasca reformasi walaupun masih ada namun telah kehilangan fungsi dan kepercayaan dari masyarakat. Menurutnya ada tiga hal yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Pertama, ialah karena faktor perubahan 'sosial order' yang disebabkan oleh perubahan politik nasional. Setiap individu di era yang baru ini, lebih berani untuk menyuarkan aspirasinya secara bebas dan terbuka walaupun itu bertentangan dengan pemerintah. Kedua, kebanyakan perkumpulan sosial merupakan kepanjangan dari birokrasi pemerintah yang lebih menekankan kuasa dari pada kepentingan masyarakat. Ketiga, karena tidak adanya pemimpin masyarakat yang mampu menggerakkan masyarakat dalam berkatifitas di perkumpulan sosial tersebut.

Di tengah mati surinya perkumpulan-perkumpulan sosial seperti PKK, Dasa Wisma, Karang Taruna, DKM, dan lain-lain Nugroho (2003) mengamati perkembangan Baitul Mal Wal Tamil (BMT) yang cenderung berkembang pesat. Dalam studi ini diperlihatkan bahwa dasar pembentukan BMT disandarkan pada filosofi keagamaan tentang kemandirian serta kepedulian kepada sesama. Selain itu, BMT memberikan layanan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak; kredit mikro. Pelayanan yang baik dan organisasi yang dikelola dengan profesional membuat BMT semakin diminati oleh masyarakat perkotaan Jakarta.

Fenomena BMT ini memberikan pemahaman baru tentang perkumpulan sosial masyarakat pasca orde baru. Studi ini pada kesimpulannya membagi perkumpulan sosial menjadi dua, pertama ialah perkumpulan sosial

yang menyebabkan konflik di masyarakat karena lebih mengedepankan kepentingan pemimpinnya dibandingkan kepentingan bersama. Kedua, yaitu perkumpulan sosial yang memberdayakan masyarakat. Perkumpulan sosial ini baru muncul ketika era reformasi karena adanya tekan politik yang begitu kuat dari pemerintah yang tentunya menyebabkan keengganan masyarakat untuk berinovasi.

Selaras dengan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, studi Achwan (2012) memaparkan tentang berkembangnya perkumpulan sosial masyarakat 'Cridit Union Pancur Kasih' di Kalimantan Barat. Dalam studi ini dijelaskan bagaimana performa CUPK sebagai lembaga microfinance yang cukup baik dari segi anggota, aset, serta 'kesehatan' kridit. Bahkan pada tahun 2011, pendiri dari perkumpulan sosial ini menjadi salah satu nominasi salah satu penghargaan di stasiun televisi swasta nasional. CUPK digambarkan oleh Achwan sebagai representasi dari kelompok etnik Dayak di Kalimantan Barat dengan konteks pasca orde baru.

Kelompok etnis Dayak yang selama pemerintahan Orde Baru selalu terekslusi baik secara ekonomi, politik, dan budaya memuncak dengan konflik berdarah dan menelan banyak korban jiwa yang melibatkan kelompok etnik dayak dengan etnik pendatang pada tahun 1999. Kekuatan identitas kedayakan ini memang sengaja dijadikan *brand* dari CUPK untuk meningkatkan derajat orang Dayak yang telah lama terekslusi. CUPK pun ternyata terkoneksi sangat baik dengan perkumpulan sosial lainnya yang memiliki kesamaan identitas

kedayaan seperti Yayasan Pancur Kasih yang terdiri dari para intelektual dari etnis Dayak. Bahkan kini, Yayasan Pancur Kasih juga mendirikan banyak organisasi sosial seperti Bank Perkeriditan Rakyat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sekolah-sekolah, supermarket, lembaga studi, serta media massa lokal. Konektivitas organisasi-organisasi tersebut dikelola oleh Yayasan Pancur Kasih (YPK), bahkan kini CUPK sudah banyak didirikan di luar Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Achwan juga memberikan penjelasan tentang kecakapan pengelolaan CUPK yang membuat lembaga *microfinance* ini dapat berkembang pesat. Misalnya untuk mendapatkan pinjaman, masyarakat tidak perlu memberikan agunan (jaminan) atas kredit yang mereka inginkan. CUPK menerapkan mekanisme jaminan tersebut dengan adanya surat persetujuan/pengantar dari tokoh-tokoh setempat yang tentunya telah berafiliasi dengan CUPK dan YPK. Mekanisme ini dianggap tepat karena, tokoh-tokoh tersebut memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan taraf hidup orang Dayak.

Studi ini memberikan sumbangan untuk melihat *bounding* yang terbangun pada perkumpulan-perkumpulan sosial di era orde baru. Karena, dalam era reformasi kebebasan berserikat dan berkumpul tidak lagi mendapatkan hambatan yang berarti. Studi Nugroho (2003) sebenarnya juga memperlihatkan *bounding* keislaman yang memberikan pengaruh terhadap berkembangnya BMT. Namun sayangnya, studi tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci kelompok Islam yang mana yang menginisiasi BMT. Di sisi

lain, Achwan (2012) menggambarkan secara rinci ikatan etnis kedayaankalah yang membuat CUPK dapat berkembang pesat.

Selanjutnya studi Hadiz (2010) menjelaskan bagaimana perkumpulan sosial masyarakat berubah orientasi akibat desentralisasi. Dalam studi tersebut, dijelaskan bagaimana desentralisasi yang ditandai dengan adanya pemilihan langsung pemerintahan lokal baik pada eksekutif maupun legislatif daerah. Hadiz banyak memotret dinamika politik lokal di Indonesia terutama pada level kabupaten/kota. Perubahan konteks sosial-politik inilah yang menyebabkan beberapa perkumpulan sosial ambil bagian dalam upaya mendapatkan kuasa.

Hadiz dalam studi ini berkontribusi untuk menunjukkan fakta bahwa selain jalur formal kepartaian, ternyata perkumpulan sosial juga dijadikan alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Dijekaskan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) seperti HMI, GMNI, KNPI, Pemuda Pancasila, dan masih banyak lagi, ternyata terlibat dalam pertarungan pemilihan pimpinan (Pilkada) daerah di Jawa Timur dan Sumatra Utara. Bahkam, REL, HIPPI, HIMPI, NU, yang notabene merupakan organisasi profesi dan masa juga terlibat dalam pertarungan Pilkada tersebut. Studi ini mengidentifikasi bahwa terlibatnya begitu banyak organisasi sosial ini ialah dalam upaya mencari "rente", atau keuntungan materiel dari dana kampanye yang digelontorkan oleh para calon yang bertarung dalam Pilkada.

Dengan demikian, temuan ini memberikan penjelasan baru bagaimana eksistensi dari

perkumpulan sosial dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi. Berbeda dengan studi-studi dalam konteks Orde Baru yang menjelaskan perkumpulan sosial terkooptasi oleh kepentingan negara, perkumpulan sosial kini menghadapi dinamika yang lebih rumit. Pemilihan langsung yang kini sudah pada level Kabupaten/Kota tentunya akan berdampak pada perkumpulan sosial sebagai arena perebutan kuasa itu.

### C. Fenomena Masyarakat Desa

Masyarakat desa (*rural community*) merupakan studi yang banyak dianalisa oleh banyak pemikir sosiologi awal. Durkheim misalnya menjelaskan masyarakat desa dengan karakteristik solidaritas mekanik, yang juga identik dengan konsep *gemenshalf* dari Tonnies. Solidaritas mekanik ialah kesatuan sosial yang didasarkan pada kesamaan individu tentang pandangan hidup dan kepercayaan (Ritzer, 2005a: 219). Di sisi lain, *geimenshalf* ialah komunitas yang menginginkan memenuhi keinginannya yang disandarkan kepada nilai intristik dan simpati kepada anggota kelompok, kebiasaan, dan kepercayaan (Ritzer, 2005b; 843).

Pengertian yang lebih mutakhir ialah definisi dari Harold Peak yang menjelaskan masyarakat desa bukan hanya pada kedekatan relasi antar keluarga dan sistem nilai, namun juga melihat masyarakat desa sebagai komunitas yang memiliki kedekatan dengan wilayahnya. Secara lebih jelas tentang definisi masyarakat desa sebagaimana dibawah ini :

*"which consists of a group related or unrelated persons larger than a single family occupying a large house or dwellings placed together, sometimes irregularly, sometimes in a street and*

*cultivating, originally in common, a number of arable fields, dividing the available meadow land between them and pasturing their cattle upon the surrounding west land over which the community claims rights as far as the boundaries of adjacent communities."* (Harold Peak, 1981: 253 dalam Goral dan Kalvire, 2012; 41 )

Sedangkan pada konteks Indonesia, desa dari sudut pandang pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan. Desa yang awalnya hanya seperangkat pemerintahan terkecil di bawah camat sebagaimana UU No. 5 tahun 1979, kini desa memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupannya secara lebih partisipatif, demokratis dan mandiri. Masa orde baru, sebagaimana yang telah digambarkan dalam banyak studi di atas (Tjondronegoro, 1984; Winarno; 2008, White; 2005), memperlihatkan desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan negara dalam upaya meningkatkan produktifitas sumber daya serta dalam upaya meredam konflik politik. Dengan demikian, desa pada masa orde baru cenderung tidak menjadi sarana bagi para penduduknya untuk mengekspresikan kepentingan mereka dalam bidang ekonomi dan politik mereka.

Semenjak pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 telah terjadi perubahan konstalasi politik antar kekuatan politik di desa (Solekhan, 2012). Salah satu dampak dari kehidupan politik desa ialah, penerapan demokrasi yang lebih mapan dengan dibuatnya BPD atau dengan nama lainya yang memiliki peran legislatif. Dengan demikian, proses pemerintahan, pembangunan,

dan politik di desa tidak lagi bermuara pada kebijakan pemerintah pusat. Pada sisi lain, dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah desa kini pun juga diberikan kewenangan lebih untuk mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Selain itu, dengan aturan tersebut, di tingkat desa dapat didirikan stuktur organisasi dari partai politik. Kondisi demikian tentunya semakin membuat kehidupan masyarakat pedesaan kini semakin kompleks, sehingga kehidupan telah jauh berubah semenjak masa pemerintahan orde baru.

Tjondronegoro (2008, disunting oleh Adiwibowo, dkk) sudah mengingatkan bahwa kajian desa di Indonesia sangat bias Jawa. Ia mendeskripsikan untuk melihat masyarakat pedesaan disandarkan pada moda pekerjaan yang dilakukan oleh warganya. Desa-desa di Jawa yang sebagian petani, stratifikasi sosialnya dapat dilihat berdasarkan kepemilikan lahan, sedangkan desa pesisir harus dilihat berdasarkan kepemilikan atas alat tangkap. Sedangkan di sisi lain, bagi masyarakat pedalaman di luar Jawa yang mengandalkan ekonomi dari perladangan memiliki kemandirian yang lebih dalam berusaha. Hanya yang perlu diamati secara khusus adalah relasinya dengan para pedagang yang menghubungkan mereka dengan pasar di kota.

Kemudian, Sajogyo dan Sajogyo (2005) telah mengidentifikasi karakteristik masyarakat pedesaan di Indonesia sebagai masyarakat yang dinamis. Melihat masyarakat desa tidak bisa dengan kaca mata

keteraturan (*order*) semata, karena dalam internal masyarakat juga terdapat konflik dan persaingan antar aktor-aktor di dalamnya. Mengenai konflik dan persaingan, Sojogyo dan Sojogyo menggaris bawahi konflik yang kerap terjadi pada masyarakat pedesaan biasanya terkait dengan masalah tanah, masalah kedudukan dan gengsi, sekitar hal perkawinan, kemudian perbedaan persepsi antara kaum tua dan muda, dan sekitar perbedaan pandangan antara pria dan wanita. Selanjutnya juga dideskripsikan kondisi atau gejala sosial tertentu yang dapat mengganggu keharmonisan antar masyarakat pedesaan. Dua hal yang mengemukakan ialah mengenai perubahan kebudayaan dan dalam permasalahan guna-guna atau perdukunan

Lebih jauh studi-studi Scott (1976; 1985; 1993) dengan perspektif kritis, melihat masyarakat pedesaan dalam kaca mata yang lebih dinamis. Scott (1993) menggambarkan bahwa relasi patron-klien pada masyarakat Asia Tenggara sangat rentan dalam hal ketergantungan dan legitimasi. Hal ini dipahami karena adanya ambang batas atas nilai "ekonomi moral paternalistik" yang mencakup keamanan fisik dan kehidupan subsisten. Secara lebih rinci Scott (1976: 76) menjelaskan ekonomi moral paternalistik tersebut dengan ungkapan "kepastian" dan "pangan serta uang untuk hidup" sebagai sebuah prasarat order di sebuah wilayah pedesaan. Sehingga jika kaum elit pedesaan tidak mampu mengakomodir itu, perlawanan kelas bawah akan dapat terjadi. Perlawanan dalam studi Scott tidak hanya termanifestasi dalam konflik terbuka, namun juga dapat dilakukan dengan

cara yang laten dan ideologis (lihat, Scott; 1985).

Dalam studi Tocqueville digambarkan mengenai bagaimana sistem demokrasi menjadi pemicu utama munculnya perkumpulan sosial. Hal tersebut dipahami karena dalam sistem demokrasi di Amerika Serikat pada waktu itu, perbedaan status sosial berdasarkan keturunan sudah tidak lagi menjadi acuan dalam bermasyarakat. Sehingga, setiap kepentingan bersama perlu diperbincangkan dan diusahakan secara bersama-sama lewat perkumpulan sosial tersebut. Studi ini penting karena memperlihatkan dampak yang signifikan atas munculnya perkumpulan sosial atas sistem politik demokrasi.

Selain itu studi ini juga menggunakan kata perkumpulan sosial (*association*) untuk menggambarkan fenomena masyarakat sipil pada awal terbentuknya demokrasi di Amerika Serikat. Perkumpulan sosial mengindikasikan kelompok masyarakat yang tidak formal dan cair dengan tujuan-tujuan seperti; mencari hiburan, mendirikan lembaga pendidikan, membangun penginapan, membangun gereja, menyebarkan buku, dan lain-lain. Kemudian, Tocqueville juga menjelaskan peran perkumpulan sosial sebagai penggerak utama pada masyarakat Amerika Serikat pada momen itu, bahkan melampaui peran pemerintah.

Dalam studi yang membahas konteks Indonesia, Tjondronegoro (1984) memperlihatkan perkumpulan sosial pada masyarakat desa sebagai kebutuhan dalam merespon stimuli internal maupun eksternal. Menurutnya, dalam memahami masyarakat desa tidak lagi cukup hanya pada melihat relasi

kekeluargaan, menurutnya desa dan tingkatan perkumpulan dibawahnya memiliki berbagai macam jenis perkumpulan sosial yang dapat dijadikan sebagai aktor pembangunan. Dalam hal ini iapun membedakan secara konseptual antara penggunaan lembaga (*institution*), organisasi (*organization*), dan juga perkumpulan. Tjondronegoro mendefinisikan perkumpulan dengan (*association*) sebagai suatu kumpulan anggota masyarakat dengan satu tujuan namun tidak memiliki stuktur yang jelas. Beberapa kelompok masyarakat yang termasuk perkumpulan antara lain, arisan, simpan pinjam, dan pengajian. Sedangkan lembaga dan organisasi merupakan suatu perkumpulan yang sudah memiliki struktur yang jelas dan juga berlaku serta berjejaring secara nasional.

Kemudian Tjondronegoro (2008) memberikan penjelasan tentang perkumpulan sosial pedesaan kini terbagi menjadi dua, yaitu perkumpulan sosial yang menekankan pada kearifan lokal masyarakat serta perkumpulan sosial yang cenderung mewakili kepentingan kota. perkumpulan sosial yang pertama cenderung merepresentasikan kelompok lemah desa, sedangkan yang kedua mencirikan kehidupan kelas menengah atas. Dengan demikian, perkumpulan pedesaan juga mencerminkan diferensiasi sosial di pedesaan.

Dalam tinjauan hukum di Indonesia perkumpulan (*association*) memang dapat di daftarkan sebagai elemen masyarakat sipil. Setidaknya-tidaknya ada enam jenis organisasi masyarakat yang diakui oleh negara untuk daftarkan badan hukumnya, sebagaimana berikut: "like the (1)

Yayasan (*Foundation*); (2) Perkumpulan (*Association*); (3) Koperasi (*Cooperative*); (4) Serikat Pekerja (*Labour/Trade Union*); (5) Organisasi Massa (*Mass Organisation*); and (6) Badan Hukum Pendidikan/BHP (*Education Legal Entity*) (Radyati, 2004 dalam Radyati, 2008; 257)".

#### D. Analisis Modal Sosial

Modal Sosial oleh banyak sosiolog dalam definisi yang jamak pula. Namun, ada benang merah yaitu modal sosial dimaknai sebagai suatu yang immaterial. Dalam artian, modal sosial tidak dipersamakan dengan modal dalam artian ekonomis. Menurut Coleman, modal sosial diidentifikasi menjadi tiga bentuk. Pertama adalah kewajiban dan pengharapan yang tergantung pada tingkat kepercayaan lingkungan sosial. Kedua, kapasitas informasi yang mengalir melalui struktur sosial dalam menyidiakan basis tindakan. Terakhir, kehadiran norma-norma yang diikuti oleh sanksi efektif (Coleman, 1994: 317 dalam Prayitno, 2004: 63)

Nan Lin (2001; 6) mendefinisikan modal sosial dalam pemaknaan yang lebih individual. Menurutnya modal sosial adalah '*investment in social relations with expected returns*'. Ia pun melanjutkan "*individual engage in interactions and networking in order to produce profits*". Dengan demikian, Lin memberikan analisa modal sosial pada ranah individual dalam kerangka *profit oriented*. Pandangan ini terlihat jelas pengaruh teori pertukaran dalam persepektif modal sosial Lin.

Pada sisi lain, Warren, Thompson, dan Saegert (2001; 1) mendefinisikan modal sosial sebagai

sebuah sumberdaya yang dimiliki antar relasi individual yang disandarkan pada kepercayaan dan kerjasama. Berikut ini adalah pernyataan yang lebih lengkap:

Social capital refers the set of resources that inhere in relationships of trust and cooperation between people...Social capital is collective asset, a feature of communities rather than property of an individual..Because it is a "common good" social capital plays a particularly important role in ensuring those aspect of personal welfare that individual alone can rarely provide (for example, security from crime and public health).

Modal sosial dalam pembahasan Bourdieu dijelaskan sebagai faktor yang menentukan tindakan sosial agen. Namun perlu dibahas lebih rinci, mengenai modal sosial sebagai penjelasan yang lebih spesifik, dibandingkan dengan konsepsi modal ekonomi yang lebih mudah dijelaskan. Modal sosial dapat dimaknai sebagai modal yang dimiliki masyarakat dalam pemberdayaan, modal tersebut merupakan perpaduan antara modal material dan juga non material. Modal material merupakan modal yang berbentuk atau terkait dengan finansial, sedangkan modal non material berwujud dengan adanya kepercayaan (*trust*) dan juga sistem kebersamaan (*gathering system*) (Bassette, 1957 dalam Guntoro, 2009; 34).

Namun, dalam pemaknaan selanjutnya keterlekatan modal material dalam terminologi modal sosial pun tereliminasi. Hal ini

dipahami sebagai salah satu upaya membedakan antara modal ekonomi dengan modal sosial itu sendiri. Dalam penjelasan modal sosial yang dikemukakan oleh Puntham, muncul pemaknaan yang lebih spesifik. Ia menjelaskan bahwa modal sosial memiliki tiga dimensi, kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan juga jaringan (*network*) (Guntoro, 2009: 34-35). Sedangkan menurut Ritzer (2004:716) ada 4 dimensi modal sosial bagi agen menurut Puntham. Pertama, akses informasi, organisasi dan juga pejabat publik. Kedua, menyebarkan norma yang efektif. Ketiga, mampu mencairkan kewajiban (utang). Keempat, memiliki posisi untuk mengetahui konflik kepentingan dan persepsi untuk menawarkan solusi yang terbaik. Demikianlah diskursus mengenai definisi dari modal sosial yang dapat dimaknai singkat sebagai sebuah kesatuan norma dan sikap saling percaya diantara masyarakat.

Dalam penelitian ini konsep modal sosial akan dioperasionalkan dengan konsep jejaring (*network*) yang dimaksud di sini mengacu pada relasi sosial yang stabil yang membentuk norma-norma *trust* dalam tujuan mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. *Network* dikategorikan sebagai modal sosial yang membantu mengumpulkan modal kapital material. *Network* diklasifikasikan sebagai *bonding* (ikatan), *bridging* (penghubung), atau *linking* (koneksi) (Szreter, 2002 dalam Achwan, 2011). Secara lebih rinci Szeter (2005) menjelaskan ketiga elemen tersebut, sebagai berikut:

“Bonding social capital networks are formed by those for whom an important element of their participation is the assertion of members’

social similarity to each other and the exclusion of other social groups, ... Bridging social capital refers to voluntary association among those who perceive themselves to be unlike—such as Putnam’s American bowling league teams in the 1950s where blacks and whites played in the same teams even in the decade before the civil rights movement. Bridging social capital is the more unusual and the more valuable kind of social capital for a democratic polity...The concept of linking social capital enables those studying social capital to include in their analysis relationships and networks that are established across formal, institutional power gradients, such as when individuals encounter officials of central or local government

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa *bonding* ditandai dengan adanya hubungan sosial yang dekat dan relatif stabil di dalam sebuah kelompok karena keanggotaannya didasarkan pada kesamaan ciri-ciri sosial yang dapat terwujud seperti; etnis, wilayah bahasa, kedekatan tempat tinggal atau agama. Sebaliknya, *bridging* merupakan hubungan sosial yang terbuka berdasarkan keanggotaan yang heterogen, dan *linking* menunjukkan relasi yang menghubungkan antara kelompok sosial dan kebijakan negara. Jejaring produksi yang baik ditandai dengan keseimbangan antara ketiga dimensi tersebut.

Sosiologi ekonomi berkontribusi terhadap perkembangan analisa sosial untuk

melihat fenomena ekonomi yang ada. Proyek ini sesungguhnya sudah dimulai dari Max Weber dengan karyanya *Society and Economy* (1968) yang menjelaskan bahwa studi ekonomi harus mencakup tiga hal; *economic phenomena, economically relevant phenomena, economically conditioned phenomena*. Selanjutnya, dalam sosiologi pun dalam relasinya dengan ekonomi *neo classic*, mencoba menawarkan teori yang menjelaskan tindakan manusia dalam berekonomi yaitu teori pertukaran, teori jaringan, dan teori pilihan rasional (Ritzer, 2011; 416-454). Teori pertukaran diperkenalkan oleh Homans yang menekankan manusia sebagai pengejar keuntungan-keuntungan dalam kehidupan, sehingga manusia sebagai individu lebih suka berhubungan dengan manusia yang lain yang memberikan manfaat kepadanya. Melanjutkan teori pertukaran, sebagai kritik munculah teori jaringan yang menekankan ada interaksi antar individual disebabkan adanya kesamaan nilai dan norma, sehingga hubungan akan kuat jika nilai dan norma yang dimiliki oleh masing-masing individu sama dan sebaliknya hubungannya akan lemah jika nilai dan normanya berbeda. Sedangkan, teori pilihan rasional menekankan bahwa individu memiliki keleluasaan dalam membentuk nilai dan normanya sendiri untuk mendapatkan tujuan-tujuan pribadinya.

Pada tahap selanjutnya, Granovetter melanjutkan teori jaringan untuk menjelaskan fenomena ekonomi. Dengan konsep inti 'kelekatan' (*embeddedness*), ia melihat pada relasi personal antar individual yang dikontraskan dengan level institusional dalam hal ini adat,

hukum, regulasi, dan aturan ekonomi yang dibuat oleh negara (Nee and Ingram, 1998: 22). Namun, Granovetter lebih menekankan kepada relasi antar individual yang baginya hal ini merupakan dasar dari tindakan ekonomi. Relasi antar individual ada yang lemah dan ada yang kuat, hal ini dipahami karena setiap individu memiliki memori tentang orang lain yang dikenalnya dalam interaksi sebelumnya. Granovetter menekankan bahwa '*high network density*' atau kepadatan jejaring yang tinggi dalam interaksi manusia disebabkan karena adanya kepercayaan (*trust*) (Nee and Ingram, 1998 ;23).

Sedangkan dalam sisi ilmu ekonomi sendiri telah berkembang analisa tentang institusi dalam ekonomi. Para ekonom *neo classical* melihat adanya ketidakefektifan transaksi jika dilakukan secara langsung antar agen/individu. Karena dalam diri setiap individu memiliki sikap oportunistik, atau orientasi untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dalam setiap transaksi ekonomi. Sehingga untuk mengefektifkan transaksi dibutuhkan institusi yang berupaya untuk menghilangkan biaya transaksi dalam setiap kegiatan ekonomi (*zero transaction cost*) (Nee, 2010: 7). Institusi dalam sudut pandang ini dimaknai secara formal yaitu dengan adanya kontrak yang dapat dijadikan jaminan dalam setiap transaksi.

Teori dan analisa di atas menggambarkan bagaimana dunia nyata dalam hal ini kegiatan ekonomi terjadi dalam dua level; agen dan institusi. Walaupun, dalam berbagai teori dan analisa di atas memiliki tekanan yang berbeda antara ranah agen atau individual dan juga



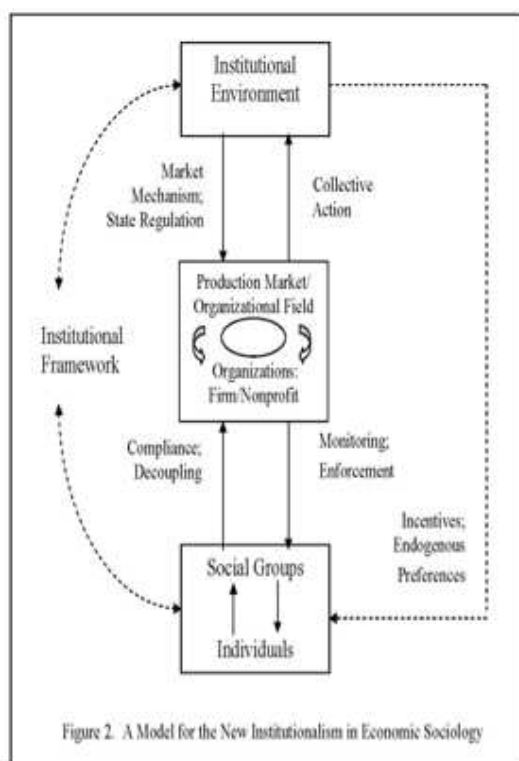
institusi. Dalam hal ini ada kekosongan dalam melihat relasi antara agen, institusi formal, dan juga organisasi makro yang juga melingkupi kehidupan agen; seperti negara, korporasi, dan organisasi masyarakat sipil. Terutama dalam pendekatan ekonomi neo klasik, telah gagal menggambarkan perubahan dalam institusi formal karena melupakan aspek kultural dan konteks sosial yang sangat penting untuk menganalisa *self-interest* pada agen (Nee and Ingram, 1998; 30). Dalam teori jaringan pun terdapat celah, yaitu dalam menjelaskan individu dengan dunia sosial yang lebih besar, karena hanya melihat pada sisi yang dekat atau level analisa yang lebih kecil.

Jika dalam pendekatan sebelumnya melihat tindakan ekonomi dalam fokus level yang berbeda, maka pendekatan ini melihat secara lebih komprehensif antara ranah agen dan institusi. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, definisi institusi dalam pendekatan ini diartikan sebagai berikut '*as dominant system of interrelated informal and formal-customs, shared beliefs, norms, and rules- which actor orient their actions to when they pursue their interest*' (Nee and Swedberg, 2005; 797). Jadi dalam pendekatan ini, institusi dilihat sebagai struktur sosial yang menyediakan dan memfasilitasi agen untuk mendapatkan kepentingannya.

Oleh karenanya untuk menjelaskan pendekatan ini Nee dan Swedberg (2005) membaginya menjadi empat proposisi. Pertama adalah *interest* (kepentingan) yang dimaknai sebagai representasi tenaga dasar yang mampu mendorong dan mengendalikan individu dalam bertindak dan menentukan sikap. Dalam hal ini kepentingan terbagi

menjadi dua tipe; ideal dan material. Dengan demikian, individu dilihat sebagai agen yang bebas, namun sebagai konsekuensi sosial, mereka harus menyesuaikan dengan lingkungan yang melingkupinya. Sehingga institusi dilihat sarana untuk mewujudkan kepentingan tiap-tiap individu.

Sebagai konsekuensi institusi dilihat sebagai kumpulan kepentingan individu, maka proposisi yang kedua adalah; elemen-elemen dari institusi informal. Sebagian besar ekonom menolak pandangan bahwa hambatan informal seperti kebiasaan dan norma menentukan tindakan ekonomi. Namun para sosiolog dan juga pandangan ini melihat mekanisme sosial membentuk kepentingan ekonomi sekaligus tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor. Nee menggambarkan adanya relasi antara ranah individual dan kelompok sosial dengan lingkungan institusi formal. Dalam relasi tersebut dihubungkan oleh ranah organisasi, baik profit/maupun non profit. Nee menggambarkan relasi ketiga level tersebut saling timbal balik sebagaimana digambarkan dalam model dibawah ini:



Sumber : (Nee and Swedberg, 2005; 801)

Ketiga adalah relasi antara elemen-elemen institusi formal dan informal. Sebagaimana gambar model di atas, pendekatan institusionalisme baru tidak dapat memisahkan individu atau aktor dalam ranah formal ataupun ranah informal. Karena secara nyata dan empirik, individu dan aktor hidup dalam perpaduan informal dan formal institusi.

Proposisi terakhir adalah hukum. Hukum merupakan domain negara sebagai organisasi yang memiliki monopoli atas kekerasan kepada warga negaranya dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, lemah atau kuatnya negara tetap saja hukum bekerja untuk menjaga keteraturan dalam teritorial suatu negara. Dalam hal ini Nee dan Swedberg ingin menggambarkan bagaimana hukum sebagai institusi

formal mempengaruhi aktor atau individu untuk menentukan kepentingan maupun bertindak secara ekonomis. Walaupun, banyak juga hukum yang ada tidak rasional, dalam artian hanya dalam upaya menguntungkan pihak-pihak penguasa.

#### E. Daftar Pustaka

- Achwan, Rochman (2011). *Contesting Business Networks in Liberalising Economy and Polity: Evidence from Regional textile Business in Indonesia*. *Asian Social Science* (7) 1, pp 60-70.
- Achwan, Rochman (2012). *The Fountain of Love Credit Union: A Vibrant Microfinance Institution in A Hostile Inter-Ethnic Society*. *Asian Case Research Journal* (10) 1, pp 93-114.
- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Alexander, C Jeffrey. 2006. *The Civil Sphere*. New York: Oxford University Perss.
- Antlov, Hans. 2003. Kiprah Madani dalam Pembaruan Pemerintah Daerah di Indonesia. (dalam Anlov, Hans dkk. 2005. *Bila Warga Ikut Menata Negara: Wacana Negeri-negeri Jiran Thailand, Indonesia, Filipina*. Manila: Institute for Popular Democracy.
- Baker, Gideon. 2002. *Civil Society and Democratic Theory: Alterative Voices*. London and New York: Routledge.
- Block, Fred and Peter Evans. 2005. *The State and Economy*. (dalam Smelseer, Neli J and Richard Swedberg. 2003. *The Handbook*

- of Economic Sociology. New York: Princeton University Perss.)
- Boidreau, Vincent. 2001. *Grass Roots and Cadre in the Protest Movement*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
- Cresswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication, Inc.
- Guntoro, Gigih. 2009. *Pengaruh Modal Sosial Masyarakat Terhadap Daya Dukung Sosial Lingkungan Permukiman Kumuh dan Padat di Kampung Rawa*. Depok: FISIP UI (Thesis).
- Gorral, Sonnopa D. 2012. *Socio-Economic Impact of Urbanization on Rural Community*. *Global Economy Research*. (Vol. I, Isuu: II hal 40-46).
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A South-East Asia Perspective*. California: Stanford University Perss.
- Long, Hualou, dkk. 2005. *Socio-economic development and land-use change: Analysis of rural housing land transition in the Transect of the Yangtse River, China*. dalam [www.elsevier.com/locate/landusepol](http://www.elsevier.com/locate/landusepol) diakses pada 2 April 2012.
- Lin, Nan, Karen Cook, and Ronald S Burt. 2001. *Social Capital: Theory and Research*. New York: Aldine De Gruyter.
- Martinussen, John. 1999. *Society, State, and Market: A Guide to Completing Theories of Development*. London and Newyork: Zed Book Ltd.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nee, Victor. 2003. *The New Institutionalisme Economic and Sociological*. Princeton: Princeton Press.
- Nee, Victor and Paul Ingram. *Embeddedness and Beyond: Institution, Exchange, and Social Structure*. Dalam Brinton, C Marry and Victor Nee. 1998. *The New Institutionalism in Sociology*. New York: Russel Sage Foundation.
- Nee, Victor and Richard Swedberg. *Economic Sociology and New Institutional Economic*, dalam Menard, C and M M Shirley. 2005. *The Hand Book of New Institutionalisme Economic*. Netherlands: Springer.
- Prayitno, Ujianto Singgih. 2004. *Modal Sosial dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin: Studi Sosiologi pada Komunitas Bantaran Ciliwung*. Depok: Sosiologi FISIP UI. (Disertasi tidak dipublikasikan)
- Prayogo, Dodi dkk. 2010. *Laporan Evaluasi Program Community Development 2008-2009 Kabupaten Anambas Kepulauan Riau*. Depok: Lab Sosio UI dan Premier Oil (tidak dipublikasikan).
- Radhakrisna, Rama. 1997. *Rural Socio-Economic Change in India: Implication for Agricultural Extension*. Spring.
- Radyati, Maria R. Nindita. 2008. *Thrid Sector Organization Governance in Indonesia: Relulation, Initiatives and Model*. (dalam Hasan, Samiul and jenny Onyx (ed.). 2008. *Comparative Third Sector Governance in Asia*. Springer).

- Ritzer, George. 2011. *Sociological Theory*. California: Sage Publication.
- Ritzer, George. 2005. *The Enciclopedia of Social Theory (First Edition)*. California: Sage Publication.
- Ritzer, George. 2005. *The Enciclopedia of Social Theory (Second Edition)*. California: Sage Publication.
- Rivera, Temario C. 1994. *Landlords and Capitalist: Class, Family, and The State in Philippine Manufacturing*. Quezon City: The University of The Philippines Press.
- Saegert, Susan, J. Philip Thompson, Mark R Warren (ed). 2001. *Social Capital and Poor Communities*. New York: Russell Sage Foundation.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo (Ed). 2005. *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scott, James C. 1976. *Moral Ekonomi Petani; Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES.
- Scott, James C. 1985. *Weapons of The Weak: Everyday Forms of The Peasant Resistance*. New Heaven: Yale University Perss
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara.
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryana, Asep. 2007. *Suburbanisasi dan Kontestasi Ruang Sosial di Citayam*. Depok: FISIP UI (Thesis tidak dipublikasikan).
- Szreter, Simon. 2005. *Health and Wealth: Studies in History and Policies*. New York: University of Rochester Press.
- Tjondronegoro, Sediono M.P. 1984. *Social Organization and Planned Development in Rural Java; A Study of the Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West Java, and Kecamatan Kendal Central Java*. Singapore: Oxford University Press.
- Tjondronegoro, Sediono M.P (disunting oleh Adiwibowo dkk.). 2008. *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Tocqueville, Alexis de (disunting oleh Stone dan Mennel). 2005. *Tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- White, Ben. 2005. *Nucleus and Plasma: Contract Farming and The Exercise of Power in Upland West Java*. (dalam Li, Tania (ed.). 2003. *Transforming The Indonesian Uplands*. Harwood Academic Publishers).
- Widjajanto, Andi dkk. 2007. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKIS.
- Wollstein, Stefanie Edler and Beate Kohler-Koch. 2008. *It's About Participation, stupid Is it? Civil-Society Concepts in Comparative Perspective*. (dalam Jobert, Bruno and Beate Kohler-Koch. 2008. *Changing Images of Civil Society: From protest to governance*. London and New York: Routledge.
- Yosihara, Naoki and Raphaella Dewantari Dwiyanto (Ed.).

2003. *Grass Roots and The Neighborhood Associations: On Japan's Chonaikai and Indonesian's RT/RW*. Jakarta: Grasindo.

Zanger, Todd R, Sergio Larazzini, dan Laura Loppo. 2001. *Informal and Formal Organization in New Institutional Economic*. (Paper).